

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian

1. Lokasi penelitian

1.1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT-MMU Sidogiri Pasuruan⁶⁶

Bermula dari keprihatinan asatidz Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan Madrasah-madrasah ranting/*filial* Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri atas perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah Islam dibidang mu'amalat padahal mereka adalah masyarakat muslim apalagi mereka sudah mulai terlanda praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi riba yang dilarang secara tegas oleh agama.

Para asatidz dan para pengurus madrasah terus berpikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan umat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian keuangan lembaga syariah yang dapat mengangkat dan menolong masyarakat bawah yang ekonominya masih dalam kelompok mikro (kecil).

⁶⁶ Mokh. Syaiful Bakhri, *Kebangkitan Ekonomi Syariah: Belajar dari Pengalaman Sidogiri*, (Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004), 38-41.

Setelah didiskusikan dengan orang-orang yang ahli, maka alhamdulillah terbentuklah wadah itu dengan nama “*Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Masalah Mursalah Lill Ummah*” disingkat dengan KJKS BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pendirian koperasi didahului dengan rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Muharram 1418H atau 1 Juni 1997 diantara orang-orang yang getol memberikan gagasan berdirinya koperasi KJKS BMT-MMU ialah :

- 1) Ustadz Muhammad Hadlori Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- 2) Ustadz Muhammad Dumairi Nor, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- 3) Ustadz Baihaqi Utsman, yang saat itu menjabat sebagai tata usaha Madrasah Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.
- 4) Ustadz H. Mahmud Ali Zain, yang saat itu menjabat sebagai ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dan salah satu ketua DTTM (*Dewan Tarbiyah wat Ta’lim Madrosy*).
- 5) Ustadz A. Muna’i Ahmad, yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Miftahul Ulum tingkat Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri.

Dengan diskusi dan musyawarah antara para kepala Madrasah Miftahul Ulum Afiliasi Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri maka menyetujui membentuk tim kecil yang diketuai oleh ustadz Mahmud Ali Zain untuk menggodok

dan menyiapkan berdirinya koperasi baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas koperasi dan sistem operasionalnya.

Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Departemen Koperasi Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi disamping mendapatkan tambahan informasi tentang BMT dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat dalam suatu acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam rangka sosialisasi kerjasama Inkopontren dengan PINBUK pusat yang dihadiri antara lain oleh :

- 1) Bapak KH. Nor Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren.
- 2) Bapak DR. Subiyakto Tjakrawardaya yang menjabat sebagai Menteri koperasi PKM saat itu.
- 3) Bapak DR. Amin Aziz yang menjabat sebagai ketua PINBUK pusat saat itu.

Dari diskusi dan konsultasi serta tambahan informasi dari beberapa pihak maka berdirilah koperasi KJKS BMT-MMU tepatnya pada tanggal 12 Robi'ul awal 1418H atau 17 Juli 1997 berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan dilaksanakan dengan diselenggarakan selamat pembukaannya yang diisi dengan pembacaan sholawat Nabi Besar SAW bersama masyarakat Wonorejo dan pengurus KJKS BMT-MMU. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak atau sewa yang luasnya kurang lebih 16,5 M² pelayanan dilakukan oleh tiga orang karyawan. Modal yang dipakai untuk usaha didapat dari simpanan anggota

yang berjumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari para asatidz dan pimpinan serta pengurus Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri dan beberapa orang asatidz pengurus Pondok Pesantren Sidogiri.

Berdirinya KJKS BMT-MMU Sidogiri sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri)⁶⁷.

Koperasi KJKS BMT-MMU Sidogiri ini telah mendapat legalitas berupa :

- 1) Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK.13/IX/97 tanggal 4 September 1997 dan telah dirubah dengan SK PAD: 518.1/PAD/BH/XVI/66/103/2009 (25 September 2009).
- 2) TDP dengan nomor : 13252600099
- 3) TDUP dengan nomor : 133/13.25/UP/IX/98
- 4) NPWP dengan nomor : 1-718-668.5-624

1.1.1. Keanggotaan:

Pada tahun 2001 ada pembukaan pendaftaran anggota baru yang dibuka dalam waktu 1 bulan yaitu dari tanggal 5 Januari s/d 6 Pebruari 2011. Disamping membuka pendaftaran, pengurus menerima penambahan atau pengurangan simpanan khusus dari anggota lama sebagai tambahan atau pengurangan modal internal koperasi.

⁶⁷ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas 2011 KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan Jawa Timur, 9.

Tabel 4.1
Keadaan anggota sampai dengan 31 Desember 2011

Lama	Keluar	Sisa	Baru	Tahun 2011
1.588 Orang	143 Orang	1.445 Orang	256 Orang	1.701 Orang

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan

1.1.2. Susunan pengurus

Ketua	: HM. Khudlori Abd. Karim
Wakil Ketua I	: A. Cholilurrohman
Wakil Ketua II	: H. Adi Hidayat
Sekretaris	: Muhammad Mujib
Bendahara	: Sufyan Afandi

1.2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BMT-MMU Sidogiri Pasuruan

1.2.1 Visi

- a. Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

1.2.2. Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

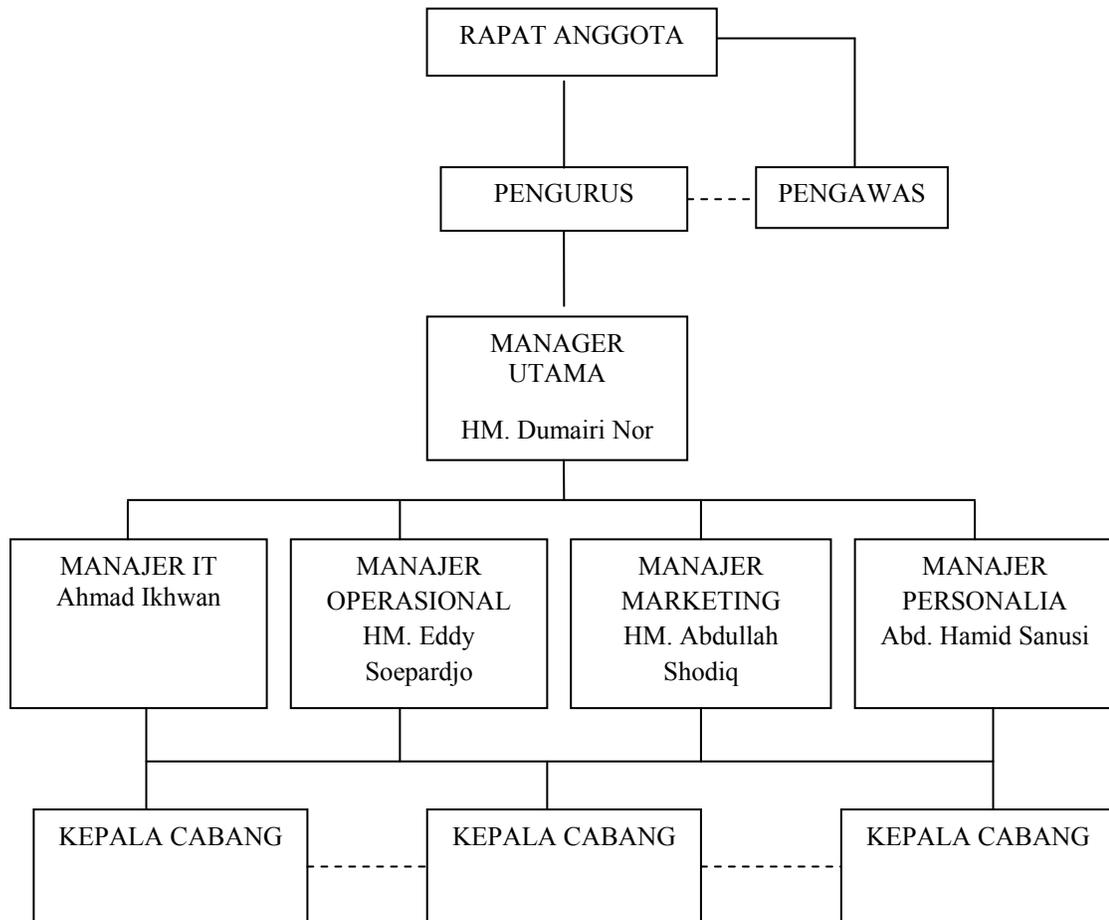
- d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq*/jujur, *Tabligh*/komunikatif, *Amanah*/dipercaya, *Fatonah*/professional).

1.2.3. Tujuan

- a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan
- b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

1.3. Struktur Organisasi KJKS BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Jatim⁶⁸

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KJKS BMT-MMU Sidogiri Pasuruan Jatim



KETERANGAN : ————— Garis Intruksi/Perintah

: - - - - - Garis Koordinasi

⁶⁸ *Ibid.*, 43.

1) Rapat Anggota

Sesuai dengan Undang-Undang RI no 25/1992 tentang Perkoperasian, bahwa anggota adalah pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Oleh karenanya Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam lembaga koperasi. Keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun. Setiap anggota harus tunduk kepada ketentuan dalam AD/ART Koperasi, peraturan khusus dan keputusan-keputusan rapat anggota.

Pada garis besarnya, anggota koperasi ada dua macam, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Perbedaan yang mencolok dari keduanya adalah anggota luar biasa tidak berhak memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas. Syarat keanggotaan yang menonjol di Koperasi BMT-MMU ini adalah berprofesi sebagai guru atau karyawan Madrasah Miftahul Ulum (AD pasal 5.b). Rapat anggota dalam lembaga koperasi merupakan kekuasaan tertinggi. Rapat Anggota Biasa menetapkan: a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b) Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha koperasi; c) Pemilihan, pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan atau pengawas; d) Penyusunan dan menetapkan RK-RAPB (Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja); e) Pengesahan atau penolakan atas pertanggungjawaban pengurus dan atau

pengawas tentang aktifitas dan usahanya; f) Pembagian SHU (Surplus Hasil Usaha) dan g) Penggabungan atau pembubaran koperasi.

2) Pengurus

Pengurus koperasi diangkat oleh anggota dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk kepentingan pengangkatan pengurus atau dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan rapat anggota tahunan (RAT). Pengurus adalah penerima amanat anggota untuk menjalankan organisasi dan usaha koperasi dengan berlandaskan pada RK–RAPB (Rencana Kerja–Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) yang diputuskan atau ditetapkan dalam rapat anggota.

Jumlah anggota pengurus sedikitnya tiga orang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Sesuai dengan anggaran dasar koperasi, masa jabatan pengurus adalah tiga tahun. Pengurus harus dipilih dari atau oleh anggota dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Pengurus tidak menerima gaji akan tetapi berhak menerima uang jasa atau uang kehormatan.

Pengurus berhak mengangkat pengelola (manager atau direksi) dengan sistem kontrak kerja untuk menjalankan dan melaksanakan usaha koperasi. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus yang mengangkat. Dalam periode 1997-2000 susunan pengurus mengalami perubahan dan perampingan yakni pada tahun pertama jumlah pengurus sebanyak tujuh orang. Pada tahun kedua dirampingkan menjadi lima orang dan ada mutasi jabatan. Karena periode kepengurusan pertama berakhir

pada bulan Desember 2000, maka RAT 2000 diadakan reformasi pengurus dan pengawas yang menghasilkan keputusan susunan pengurus periode 2001–2003.

3) Pengawas

Sesuai dengan Undang-undang RI No. 25/1992 pasal 21 bahwa perangkat organisasai koperasi terdiri dari: Rapat anggota, pengurus dan pengawas. Maka keberadaan pengawas koperasi benar-benar diakui disamping merupakan satu diantara tiga perangkat organisasi. Pengawasan koperasi dilakukan oleh pengawas yang diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota sekaligus bertanggung jawab kepada anggota.

Pengawasan atas aktifitas koperasi baik tentang keorganisasian ataupun usaha dilakukan dengan terencana atau mendadak. Apabila dianggap perlu dan mendapat persetujuan dalam rapat anggota, pengawas bisa menggunakan jasa KJA (Koperasi Jasa Audit) atau akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atau audit atas aktifitas usaha dan keuangan koperasi dalam setiap tahunnya.

Pengawas melaksanakan pengawasan paling tidak sebulan sekali yaitu pada saat laporan keuangan bulanan yang dilakukan oleh manager dihadapan pengawas dan pengurus sehingga jika ada kejanggalan dalam aktifitas dan usaha atau keuangan maka pengawas bisa menindak lanjutinya. Manager memberikan laporan keuangan dalam satu bulan operasional terdiri atas neraca, arus kas (*cash flow*), perhitungan hasil usaha dan posisi keuangan.

4) Manager

Tugas seorang manajer adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggungjawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya,
- b) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha KJKS,
- c) Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha KJKS,
- d) Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha KJKS,
- e) Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus,
- f) Menyampaikan laporan perkembangan usaha KJKS kepada pengurus setiap bulan satu kali,
- g) Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus,
- h) Menandatangani perjanjian pembiayaan,
- i) Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan plafon yang telah ditentukan,
- j) Menyetujui atau menolak setiap izin karyawan,
- k) Bersama pengurus dan pengawas menetapkan ketentuan gaji karyawan,
- l) Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus,
- m) Membuat peraturan karyawan,
- n) Menentukan target pendapatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.

1.4. Permodalan

Sekalipun koperasi primer ini sebagai wadah perkumpulan orang dan bukan terfokus pada pengumpulan modal namun lembaga koperasi adalah lembaga yang mengarah pada perilaku bisnis yang mempunyai orientasi pada profit yang membutuhkan modal untuk memulai dan melakukan aktifitasnya.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri terdiri atas: (a) Simpanan pokok, (b) Simpanan wajib, (c) Dana cadangan, dan (d) Hibah/donasi. Sedangkan modal pinjaman bisa didapat dari: (a) Anggota, (b) Koperasi lain atau anggotanya, (c) Bank atau lembaga keuangan non bank, (d) Penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, dan (e). Sumber lain yang sah dan halal. Selain dari itu koperasi melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan dengan cara yang ditetapkan dalam ART atau peraturan khusus koperasi.

Karena pembukaan pendaftaran anggota dibatasi dengan waktu maka keadaan modal tidak selalu berubah akibat pendaftaran anggota baru. Menurut ketentuan dalam AD dan ART koperasi, simpanan pokok anggota sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) simpanan wajib yang harus dibayar di awal tahun atau setiap bulan dalam satu tahunnya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan simpanan khusus tidak ditentukan nominalnya tetapi hanya ditentukan kelipatannya yakni Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan keputusan RAT 2000 setiap anggota yang akan mengisi simpanan khusus dibatasi paling besar Rp 5.000.000,- selebihnya dari itu bisa

dimasukkan dalam rekening tabungan atau menjadi modal penyertaan. Pada RAT 2001 simpanan khusus dibatasi paling besar Rp 10.000.000,- dan RAT 2002 seluruh simpanan setiap anggota maksimal sebesar Rp 20.000.000,-. Sedangkan dalam RAT 2003, simpanan khusus dibatasi maksimal Rp 25.000.000,-.⁶⁹

1.5. Ruang Lingkup Usaha dari KJKS BMT- MMU Sidogiri Pasuruan

KJKS BMT-MMU merupakan sistem simpan pinjam dengan pola syariah. Sistem KJKS ini adalah konsep mu'amalah syariah, tenaga yang menangani kegiatan KJKS ini telah mendapat pelatihan dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) cabang Surabaya dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pasuruan dan Jawa Timur. Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga profesional.

KJKS menghimpun dana dari anggota dan calon anggota atau masyarakat dengan akad *wadi'ah* atau *muḍarabah*, *qirodh* atau *qard*. Sedangkan peminjaman atau pembiayaan dengan menggunakan salah satu diantara lima akad *muḍarabah/qiradh*, *musyarakah/syirkah*, *murabahah*, *bai' bitsaman ajil* dan *qard al ḥasan*. Dalam mu'amalah pola syariah tidak menggunakan imbalan bunga, tapi menggunakan imbalan bagi hasil untuk *muḍarabah* dan *musyarakah* atau imbalan laba untuk *murabahah* dan *bai' bitsamanil ajil* (BBA). *Qard ḥasan* biasanya dipakai untuk kegiatan yang bersifat sosial (nirlaba).

⁶⁹ *Ibid.*, 47.

1.6. Jenis-jenis Produk KJKS BMT-MMU Sidogiri Pasuruan

1.6.1. Simpanan

Pemilik harta (*Shahibul Mal*) menyimpan dananya di KJKS BMT-MMU dengan akad *muḍarabah mutlaq* atau *qord* atau *wadi'ah yadud dhamanah*. Keuntungan bagi penabung: pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan untuk menghutangi, aman dan terhindar dari riba dan haram, ikut membantu sesama umat (*ta'awun*), mendapat imbalan bagi hasil yang halal. Jenis simpanan di KJKS BMT-MMU Sidogiri yaitu :

- a. Simpanan umum yaitu, simpanan yang bisa diambil setiap saat.
- b. Simpanan pendidikan yaitu, simpanan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan yang dapat diambil sesuai kesepakatan bersama.
- c. Simpanan Idul Fitri yaitu, simpanan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari Raya Idul Fitri atau sebulan sebelum hari Raya Idul Fitri.
- d. Simpanan Ibadah Qurban yaitu, simpanan sebagai sarana untuk memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari Raya Idul Adha atau hari-hari *tasyriq*. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari Raya Idul Adha (sebulan sebelumnya).
- e. Simpanan Walimah yaitu, simpanan yang digunakan untuk membiayai walimah (pernikahan dan lainnya). Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan.

- f. Simpanan Ziarah yaitu, simpanan untuk keperluan ziarah. Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.
- g. *Muḍarabah* Berjangka (Deposito), simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, atau dua belas bulan. Keuntungan bagi mitra yaitu : (1) sama dengan keuntungan bagi mitra; (2) *nisbah* (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan; (3) bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

1.6.2. Pembiayaan

KJKS BMT-MMU memberikan pembiayaan dengan menggunakan skema sebagai berikut

a) *Muḍarabah* (bagi hasil)

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh KJKS BMT-MMU sedang nasabah menyediakan usaha dan menejemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b) *Murabahah*

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) *Musyarakah* (penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam menejemen usaha tersebut. Keuntungan

dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

d) *Bai' Bitsamanil Ajil* (investasi)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di *mark-up* yang telah disepakati bersama.

1.7. Cabang pelayanan

Pada permulaan operasi tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 atau 17 Juli 1997 koperasi BMT MMU membuka satu cabang usaha yang ditempatkan di sebelah barat pasar Wonorejo. Dengan kantor yang berukuran $\pm 16,5 \text{ m}^2$, koperasi BMT MMU mulai beroperasi dengan usaha BMT (*Baitul Mal wat Tamwil/* Balai Usaha Mandiri Terpadu) atau simpan pinjam pola syariah.

Setahun kemudian membuka satu cabang usaha baru yaitu usaha pertokoan yang diletakkan disebelah utara pasar Wonorejo. Dengan munculnya dua cabang tersebut, maka usaha BMT disebut sebagai Cabang Satu, sedang usaha pertokoan disebut sebagai Cabang Dua. Seiring dengan pertumbuhan modal, aset dan omset bisnis syariahnya, maka sejak 31 Desember 2003, koperasi BMT MMU Sidogiri telah berkembang menjadi 12 unit. Tiga diantaranya merupakan unit usaha riil yaitu unit toko kebutuhan rumah tangga di Sidogiri, pengeringan dan penggilingan padi di Jetis dan produksi roti di Jeruk. Sedang sembilan diantaranya merupakan unit BMT yaitu BMT Wonorejo, BMT Rembang, BMT Kraton, BMT Warungdowo,

BMT Nongkojajar, BMT Gondangwetan, BMT Sidogiri, BMT Grati dan BMT Prigen.⁷⁰

2. Gambaran Umum Pembiayaan *Qard al Hasan* KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan

Sejak berdiri tahun 1997 KJKS BMT MMU Sidogiri menunjukkan kinerja dan kemajuan yang pesat. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan modal, keuntungan dan sisa hasil usaha yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada awal berdirinya, BMT ini hanya memiliki modal Rp 13.500.000,- yang dihimpun dari guru-guru Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri, namun pada tahun 2011, modal yang berhasil dihimpun sudah mencapai Rp 15.402.060.000,-.

Demikian pula dengan pertumbuhan omset dan SHU yang terus bertambah setiap tahunnya. Keuntungan pada tahun 2007 mencapai Rp 1.263.442.484,26. Lima tahun kemudian (2011), keuntungannya berkembang lebih dari lima kali lipat sehingga mencapai 6.250.069.768,08. Seiring dengan semakin besarnya modal dan keuntungan usahanya, SHU yang diberikan kepada anggota juga terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2007, total SHU Rp 1.263.442.484,26 , dan tahun 2011 jumlah SHU sudah mencapai Rp 6.527.655.078,08.

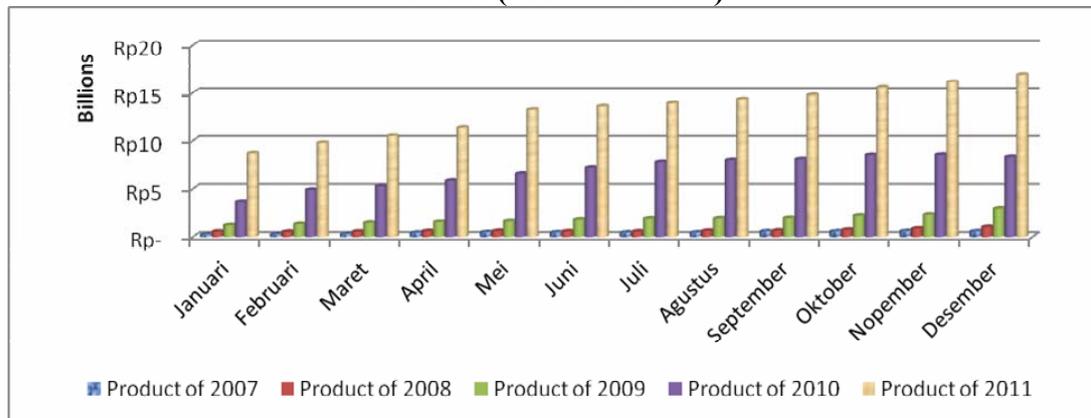
Dengan banyaknya dana yang terkumpul oleh KJKS BMT MMU Sidogiri dana tersebut disalurkan kembali kepada para pengusaha kecil dan mikro yang membutuhkan tambahan modal. Kini KJKS BMT MMU Sidogiri telah memberikan

⁷⁰ *Ibid.*, 49.

pembiayaan kepada 25.317 anggota kecil dan mikro. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT MMU sidogiri adalah pembiayaan *qard*. Pembiayaan *qard* terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, posisi pembiayaan mencapai Rp 593.313.977,-. Pada tahun 2008, naik lagi menjadi Rp 1.063.443.050,- dan hingga 31 Desember 2011 telah mencapai Rp 16.906.669.782,-.

Pembiayaan *qard al hasan* KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan dari tahun 2007 hingga 2011 dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini :

Gambar 4.2
Grafik Pertumbuhan Qard al Hasan pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan
Periode (2007:1-2011:12)



Sumber : Laporan Keuangan Bulanan KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan (dengan pengolahan)

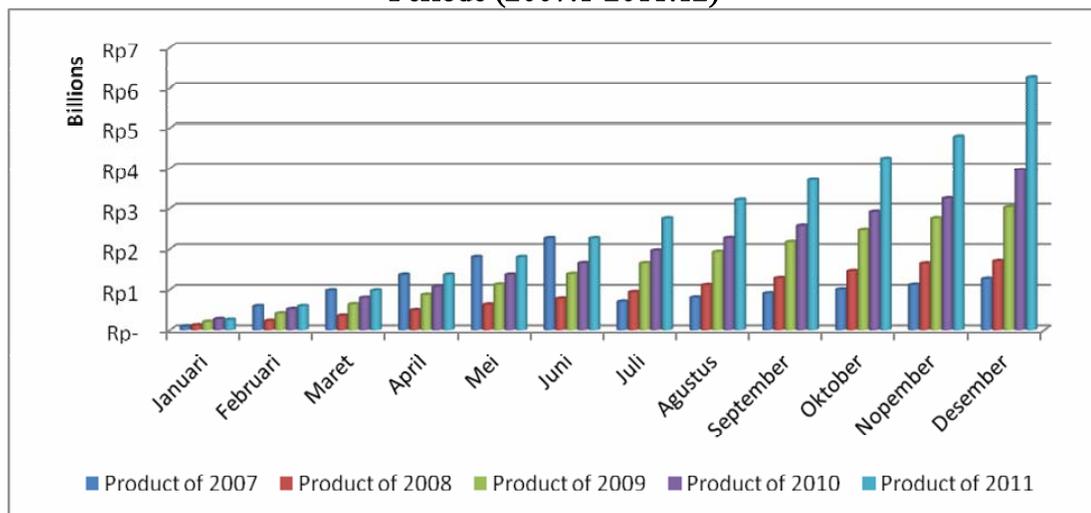
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui *qard al hasan* mengalami fluktuasi yang positif tiap tahunnya. Pada tahun 2007 *qard al hasan* memiliki tren meningkat hingga bulan Mei, kemudian mengalami penurunan sebesar 4,9% pada bulan Juni. *Qard al hasan* meningkat kembali hingga mencapai pembiayaan tertinggi

pada bulan Nopember dengan tingkat pembiayaan 11% di tahun 2007. Dan terus mengalami pertumbuhan yang pesat hingga akhir 2011.

3. Gambaran Umum Laba KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan

Berdasarkan laporan keuangan koperasi pada akhir tahun 2011 menunjukkan KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan membukukan peningkatan laba bersih sebesar 37% dari Rp 3.950.960.090,04 menjadi Rp 6.250.069.768,08. Maningkatnya laba mengindikasikan bahwa manajemen KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan sampai tahun 2011 telah mampu melakukan efisiensi manajerial. Meningkatnya laba KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan dapat dilihat dalam Gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3
Grafik Pertumbuhan Laba pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan
Periode (2007:1-2011:12)



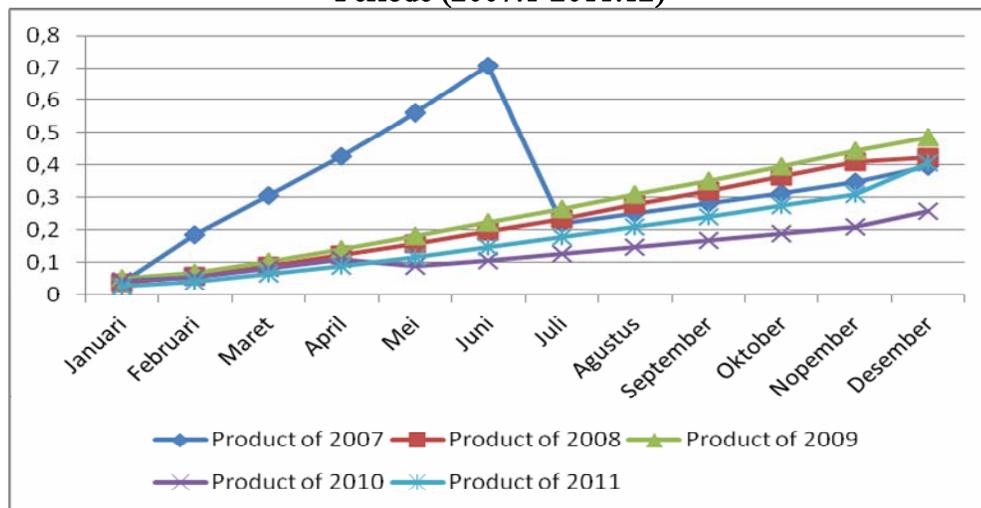
Sumber : Laporan Keuangan Bulanan KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan (dengan pengolahan)

4. Gambaran Umum *Return on Equity* (ROE) KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersih. ROE pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan dari tahun 2007 hingga tahun 2011 rata-rata sebesar 22%.

Fluktuasi ROE pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut :

Gambar 4.4
Grafik *Return on Equity* pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan
Periode (2007:1-2011:12)



Sumber : Laporan Keuangan Bulanan KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan (dengan pengolahan)

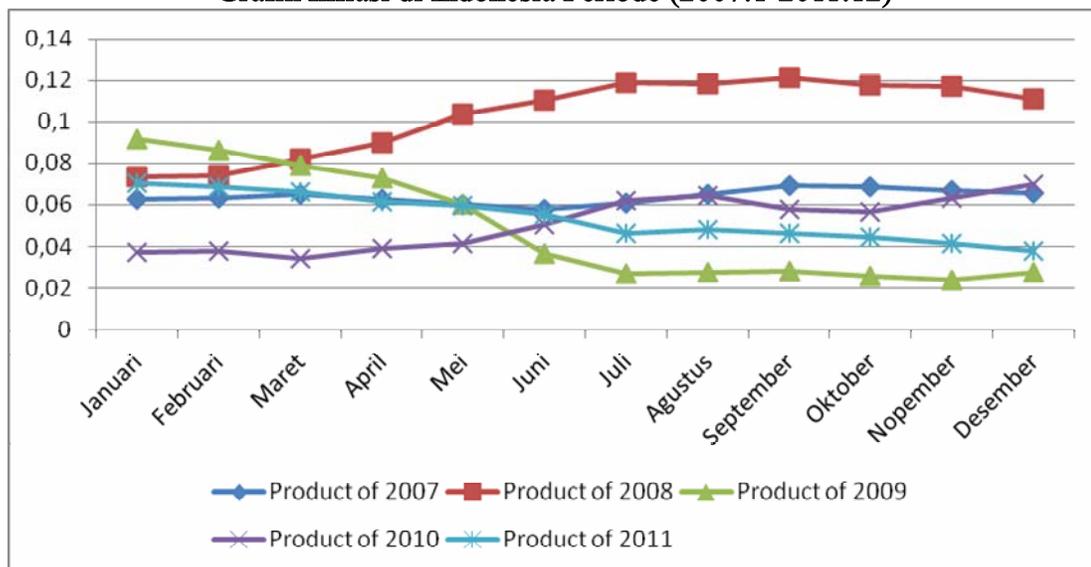
Berdasarkan grafik di atas tingkat ROE tertinggi terjadi pada bulan Juni 2007, sebesar 71%, sedangkan ROE terendah terjadi pada bulan Januari 2011, sebesar 3%. Pada tahun 2008 sampai 2009 ROE pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan mengalami peningkatan dengan rata-rata 24%. Stabilitasnya nilai ROE mengindikasikan bahwa pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan pada tahun 2008

dan 2009 mampu mengelola modal yang dimiliki dengan baik dalam menghasilkan laba bersih.

5. Gambaran Umum Inflasi di Indonesia

Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Prosentase inflasi pada tahun 2007 hingga tahun 2011 di Indonesia menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Grafik Inflasi di Indonesia Periode (2007:1-2011:12)



Sumber : Bank Indonesia, www.ib.go.id (dengan pengolahan)

Pada Mei tahun 2008 hingga akhir tahun 2008 nilai Inflasi berada di atas 10%, prosentase tertinggi terjadi pada bulan September tahun 2008. Peristiwa ini terjadi karena selain adanya krisis keuangan global juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur oleh pemerintah dan bahan makanan yang bergejolah. Sepanjang tahun 2009

inflasi mengalami penurunan secara bertahap dan turun drastis sebesar 8,3% pada akhir tahun 2009. Pada awal tahun 2010 inflasi kembali mulai mengalami peningkatan hingga di akhir tahun 2011 nilai inflasi sebesar 3,79%.

B. Analisis Data

Penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas yaitu laba, *return on equity* dan inflasi terhadap variabel terikat yaitu, pembiayaan *qard al hasan* yang masing-masing menggunakan data selama kurun waktu lima tahun.

Hasil regresi berganda diperoleh melalui uji regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Tujuan dari pengujian tersebut agar memperoleh hasil regresi berganda yang tepat dan terbebas dari permasalahan dalam asumsi klasik. Proses uji data tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

1. Uji Asumsi Klasik

1.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Dalam pembahasan ini metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi, pada umumnya jika terdapat variabel bebas yang memiliki nilai

tolerance lebih dari 0,10 nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoleniaritas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1.
Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Variabel Bebas	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
Laba	0,646	1,547	Non Multikolinearitas
<i>Retur on Equity</i>	0,760	1,316	Non Multikolinearitas
Inflasi	0,826	1,211	Non Multikolinearitas

Sumber : hasil olahan SPSS (terlampir)

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 1.1 terlihat bahwa tidak ada multikolinieritas pada masing-masing variabel bebas dimana nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 , sehingga dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

1.2. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana *varians* dari setiap gangguan tidak konstan. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual data yang ada. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Cara yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan Uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Tabel 5.2
Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	Nilai Sig.	Keterangan
Laba	0,169	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<i>Retur on Equity</i>	0,160	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Inflasi	0,468	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : hasil olahan SPSS (terlampir)

Berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

1.3. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	$0 < dW < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	$dl \leq dW \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	$4-dl < dW < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	$4-du \leq dW \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	$du < dW < 4-du$

Tabel 5.3
Hasil Uji Asumsi Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.887 ^a	.787	.775	2,42515E9	.517

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Return on Equity, Laba

b. Dependent Variabel: Pembiayaan Qard al Hasan

Dari hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai DW hitung sebesar 0,517. Nilai DW hitung ini kemudian dibandingkan dengan DW tabel dengan signifikansi 5%, jumlah sampel 60 dan jumlah variabel bebas 3, maka diperoleh DW hitung sebesar dl 1,317 dan du sebesar 1,520.

dl	1,317
du	1,520
4-dl	2,683
4-du	2,480

Karena DW hitung lebih kecil dibanding dl atau $0 < DW < dl$, maka dapat dinyatakan bahwa model terkena masalah autokorelasi positif.

Adanya autokorelasi positif, maka nilai standar error (SE) dan nilai t statistic tidak dapat dipercaya sehingga diperlukan penyembuhan. Penyembuhan autokorelasi dengan membuat variabel baru *lag* satu dari residual. Hasil penyembuhan autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Hasil Penyembuhan Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 ^a	.997	.997	2,80085E8	1.693

a. Predictors: (Constant), Lag_Y, Return on Equity, Inflasi, Laba

b. Dependent Variabel: Pembiayaan Qard al Hasan

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan nilai DW. Nilai DW awal yaitu sebesar 0,517 yang menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi positif, setelah dilakukan penyembuhan dengan *Lag* maka nilai DW naik menjadi 1,693. Oleh karena nilai DW 1,693 lebih besar dari du 1,520 dan kurang dari $4-du$ yaitu 2,480 ($du < dW < 4-du$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif ataupun negatif jadi dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

1.4. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

Tabel 5.5
Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97424460
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.144
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		1.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.169
a. Test distribution is Normal.		

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Sig. lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan. Tidak signifikan ini berarti data relatif sama dengan rata-rata sehingga dikatakan normal.

2. Pembuktian Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

2.1 Regresi linear berganda

Hasil uji statistik pada variabel-variabel bebas (laba, ROE dan inflasi) pada pembiayaan *qard al hasan* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Pembuktian Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Variabel Pembiayaan <i>Qard al Hasan</i>	Koefisien Regresi (beta)	t hitung	Sign.	Keterangan Hipotesis
Laba	3,946	12,545	0,000	$p < 0,05$ Ho=ditolak
ROE	-2,240E10	-9,018	0,000	$p < 0,05$ Ho=ditolak
Inflasi	-7,326E9	-0,543	0,589	$p > 0,05$ Ho=diterima
konstanta	3,700E9			

Sumber : hasil olahan SPSS (terlampir)

Model regresi linear berganda berdasarkan hasil analisis di atas adalah:

$$\hat{Y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

$$\hat{Y} = 3,700E9 + 3,946x_1 - 2,240E10x_2 - 7,326E9x_3$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut di atas memberikan pengertian bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 3,700E9, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu laba, ROE dan inflasi maka pembiayaan *qard al hasan* tidak akan mengalami perubahan (konstan).
- b. Nilai dari koefisien regresi (b_1) sebesar 3,946 dengan tanda positif, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel laba, maka secara langsung akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *qard al hasan* sebesar 3,946.
- c. Nilai koefisien regresi (b_2) sebesar (-2,240E10) dengan tanda negatif, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel *return on equity*, maka secara langsung akan mengurangi terhadap pembiayaan *qard al hasan* sebesar 2,240E10.

- d. Nilai koefisien regresi (b_3) sebesar $(-7,326E9)$ dengan tanda negatif, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel *inflasi* maka secara langsung akan mengurangi terhadap pembiayaan *qard al hasan* sebesar $7,326E9$.

2.2. Uji koefisien determinasi berganda (R^2)

Besarnya presentase variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas (koefisien determinasi) ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* (R^2) yaitu sebesar 0,775 menggunakan R^2 karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari 1, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan *qard al hasan* mampu dijelaskan oleh laba, ROE dan inflasi dengan nilai sebesar 77,5% sedangkan sisanya sebesar 22,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasan Bisri tahun 2009 diketahui dari hasil analisisnya bahwa variabel dimensi etik akuntansi manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan *qard al-hasan* yaitu sebesar 0,531 atau 53,1%. Indikator yang paling berpengaruh signifikan dalam penelitian atas variabel dimensi etik akuntansi yang memepengaruhi pembiayaan *qard al hasan* antara lain: pemenuhan janji, kesetiaan dan akuntabilitas. Dijelaskan oleh Hasan Bisri hal ini menunjukkan di lingkungan BMT MMU ketiga variabel tersebut merupakan nilai moral yang paling utama yang digunakan dalam menilai nasabah, dan hal ini sesuai dengan firman Allah, dimana pemenuhan janji sesuai dengan surat surat *Al A'raf* ayat 172 dimana dalam bisnis yang paling utama adalah

kita harus memenuhi janji yang telah dibuat agar kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar dan dusta, kemudian tentang kesetiaan dimana sesuai dengan surat *An Nisa'* ayat 58 dan akuntabilitas sesuai dengan surat *Al Baqarah* ayat 282, sehingga hubungan sebagai mitra kerja antara nasabah dan BMT MMU tetap terjaga.⁷¹

Jadi dalam penelitian ini pembiayaan *qard al hasan* mampu dijelaskan oleh laba, ROE dan inflasi dengan nilai sebesar 77,5%, sedangkan sisanya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasan Bisri yaitu pemenuhan janji, kesetiaan, dan akuntabilitas mampu mempengaruhi keputusan pembiayaan *qard al hasan* sebesar 53,1%.

2.1. Uji Simultan (uji F)

Uji F merupakan alat uji statistik secara simultan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh variabel bebas yaitu laba, ROE dan inflasi terhadap variabel terikat yaitu pembiayaan *qard al hasan* secara bersama-sama.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁷¹ Hasan Bisri, 2009, *Pengaruh Dimensi Etik Akuntansi Manajemen terhadap Keputusan Pembiayaan Qard al-hasan di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah Sidogiri Pasuruan*, Skripsi, Tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang.

Tabel 5.7
Uji F

Hipotesis	F _{Hitung}	Sign. F	F _{Tabel}
Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan oleh variabel bebas yaitu laba, ROE dan inflasi terhadap pembiayaan <i>qard al hasan</i> .	68,839	0,000	2,79

Sumber : hasil olahan SPSS (terlampir)

Berdasarkan tabel hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dengan nilai F_{hitung} sebesar $(68,839) > F_{tabel}$ sebesar $(2,79)$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel laba, ROE dan inflasi terhadap keputusan pembiayaan *qard al hasan*.

2.2. Uji parsial (Uji t)

Uji t merupakan alat uji statistik secara parsial untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel bebas yaitu laba, ROE dan inflasi terhadap variabel terikat yaitu pembiayaan *qard al hasan* secara parsial.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8
Uji t

Hipotesis	t _{Hitung}	Sign. T	t _{Tabel}
Laba	12,545	0,000	2,00
ROE	-9,018	0,000	2,00
Inflasi	-0,543	0,589	2,00

Sumber : hasil olahan SPSS (terlampir)

- a) Variabel Laba, memiliki nilai t_{hitung} $12,545 > t_{tabel}$ $2,00$ dan nilai signifikan sebesar $0,000$, sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel laba berpengaruh signifikan secara persial terhadap pembiayaan *qard al hasan*.

- b) Variabel ROE, memiliki nilai $t_{hitung} -9,018 < t_{tabel} 2,00$ dan nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel ROE berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *qard al hasan*.
- c) Variabel inflasi, memiliki nilai $t_{hitung} -0,543 < t_{tabel} 2,00$ dan nilai signifikan sebesar 0,589, sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *qard al hasan*.

Hasil uji t pada regresi data penelitian yang berupa data *time series* menunjukkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat adalah laba dan ROE. Berdasarkan hasil uji statistik Tabel 5.8 variabel laba memiliki nilai t_{hitung} sebesar 12,545 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,00 dan nilai signifikansi sebesar 0,000; variabel ROE memiliki nilai t_{hitung} sebesar -9,018 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,00 dan nilai signifikansi 0,000 dan variabel inflasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,543 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,00 dan nilai signifikansi sebesar 0,589. Teknis analisis data pada Bab III mengatakan, $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel yang memiliki nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ adalah variabel laba dan ROE, sehingga dapat dikatakan variabel laba dan ROE memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *qard al hasan*. Variabel inflasi, memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial pada variabel bebas inflasi terhadap variabel terikat pembiayaan *qard al hasan*.

C. Pembahasan

Konsep tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau disebut dengan istilah CSR (*corporate social responsibility*) adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi perusahaan dalam masyarakat harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

Corporate social responsibility ini tidak boleh dimaknai hanya sebatas untuk mencari keuntungan secara maksimal, ataupun keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam beroperasi di suatu wilayah tertentu saja namun, juga harus benar-benar menyentuh pada kebutuhan hak asasi masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kearah yang lebih baik. Merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Menurut John Elkington yang dituangkan kedalam buku “*Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998)” konsep *corporate social responsibility* dikemas kedalam tiga komponen prinsip yakni: *Profit, Planet,* dan *People* (3P). Konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan belaka

(*profit oriented*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).⁷²

Konsep *tawazun* dalam asas transaksi syariah yang berarti keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan rill, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian tak boleh dilupakan oleh suatu entitas syariah. Meski tanggung jawab sosial adalah penting namun tak boleh dipandang sebelah mata bahwa kelangsungan perusahaan juga juga harus menjadi perhatian atas pengelolaan manajemennya. Pengendalian atas manajemen resiko menjadi salah satu yang harus ditangani secara serius oleh manajemen dimana untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya. Di KJKS BMT MMU Sidogiri masalah penetapan persentase dana untuk dialokasikan kepada pembiayaan *qard al hasan* berdasarkan hasil wawancara yang telah dirangkum oleh penulis bahwa, persentase pemberian atas jenis-jenis pembiayaan adalah tidak ada ketentuan jelas tentang berapa persen dari dana yang disediakan untuk alokasi pembiayaan yang akan digunakan untuk setiap jenis pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Jadi meskipun KJKS bukanlah semata lembaga yang *profit oriented* tapi juga tak boleh mengacukan masalah *profit* karena berhubungan dengan kelangsungan usahanya dan perlindungan terhadap kepentingan dan kepercayaan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

⁷² Anas Ferdian, t.t, "Menelusuri Jejak CSR Pada BUMN", <http://menelusuri-jejak-csr-pada-bumn.blogspot.com/>, diakses pada 5 Januari 2013.

Sebagai contoh, dalam pasal 2 dan pasal 88, Keputusan Menteri Negara BUMN (Kepmen.BUMN) No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen.BUMN) No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan keputusan menteri tersebut, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan kedalam dua program yaitu, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Yang dimaksud dengan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Apabila dirunut jauh kebelakang, sebenarnya peran perseroan milik pemerintah telah dimulai sejak tahun 1983 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Didalam Pasal 2 PP tersebut disebutkan bahwa salah satu dari maksud dan tujuan kegiatan Perjan, Perum, dan Persero adalah turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi. Pada masa itu perseroan milik pemerintah yang

melaksanakan kegiatan pembinaan usaha kecil dan masyarakat sering disebut-sebut sebagai “Bapak angkat usaha kecil / industri kecil”. Baru setelah muncul Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) No. 1232 / KMK.013 / 1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui BUMN, nama program tersebut dikenal dengan “Program Pegelkop”.

Didalam Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989 disebutkan bahwa BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2). Pembinaan diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (Pasal 3). Kepmenkeu No. 1232 Tahun 1989 tersebut juga secara eksplisit menegaskan bahwa pembiayaan untuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BUMN diambil/disediakan dari bagian laba BUMN yang bersangkutan, dengan besaran antara 1%-5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4). Dengan Kepmenkeu No. 306 / KMK.013 / 1991 Tanggal 20 Maret 1991, yang merupakan penyempurnaan Kepmenkeu No. 1232 / KMK.013 / 1989, diberikan batasan maksimal pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dari ilustrasi tersebut nampak bahwa perlunya penetapan yang jelas terhadap persentase suatu kegiatan baik itu yang berupa pembiayaan atau sebagainya agar kinerja perusahaannya lebih terarah dan baik terutama dalam hal kinerja keuangannya yang efisien dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya KJKS BMT MMU sidogiri mengapresiasikannya dalam bentuk pembiayaan *qard al hasan* yang merupakan salah satu jenis akad yang bersifat *tabarru'* artinya, pembiayaan *qard al hasan* pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan digunakan sebagai pembiayaan yang bersifat membantu atau memberikan suatu jasa kepada anggota yang membutuhkan dana mendesak. Pihak KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan menyediakan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan serta mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam akad pembiayaan *qard al hasan*, imbalan diakui pada saat diterima dan tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

KJKS BMT MMU Sidogiri dalam menjalankan fungsi sosialnya dimana salah satunya yaitu melalui pemberian pinjaman kebajikan yaitu dalam akad pembiayaan *qard al hasan* akan melahirkan nilai positif terhadap aspek sosial juga pada aspek keuntungan yang berlipat ganda untuk individu maupun pihak KJKS. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka masa yng penjang akan menciptakan citra positif bagi KJKS.

Pemberian pembiayaan *qard al hasan* pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan tentunya tidak lepas dari jumlah laba bersih yang diterima. Berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai $t_{hitung} 12,545 > t_{tabel} 2,00$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan tanda positif, sehingga dapat diasumsikan bahwa variabel laba berpengaruh positif dan signifikan secara persial terhadap pembiayaan *qard al hasan*.

Sehingga dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel laba, maka secara langsung akan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *qard al hasan* hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi laba yang nilainya sebesar 3,946. Hubungan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, apabila laba bersih KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan meningkat Rp 1000 maka pembiayaan *qard al hasan* naik sebesar Rp 3,946 rupiah. Dapat dikatakan semakin banyak laba yang mampu dihimpun KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan maka semakin banyak juga dana yang disalurkan untuk transaksi pembiayaan *qard al hasan*.

Penggunaan laba sebagai salah satu sumber pembiayaan *qard al hasan* telah sesuai dengan Fatwa DSN no 19. mengenai sumber dana *Qard* yang berasal dari laba dan modal LKS. Semakin banyak laba yang dihasilkan oleh KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan maka pemberian pembiayaan *qard al hasan* akan semakin besar.

Pemberian pembiayaan *qard al hasan* pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan tentunya tidak lepas dari pengaruh kinerja manajemen dalam memutar modal agar mendapatkan keuntungan. Penilaian kinerja KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan dan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Equity* (ROE). Semakin banyak *return* yang dihasilkan maka pembiayaan yang diberikan oleh KJKS semakin besar, karena KJKS menggunakan modal yang dimiliki untuk ditanamkan kembali.

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi ROE sebesar 0,000, hal ini menunjukkan bahwa *Return on Equity* (ROE) memiliki pengaruh yang

signifikan pada pembiayaan *qard al ḥasan* dan signifikansi *Return on Equity* (ROE) terhadap pembiayaan *qard al ḥasan* memiliki hubungan yang negatif hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi *Return on Equity* (ROE) yang nilainya sebesar -2,240E10. Hubungan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, apabila *Return on Equity* (ROE) KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan meningkat 1% maka pemberian pembiayaan *qard al ḥasan* turun sebesar 2,240E10.

Dalam teorinya ketika semakin banyak *return* yang dihasilkan maka pembiayaan yang diberikan oleh KJKS akan semakin besar, karena KJKS menggunakan modal yang dimiliki untuk ditanamkan kembali. Namun adanya hubungan negatif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi di atas bisa disebabkan oleh karena tidak adanya standar persentase terhadap penyaluran pembiayaan *qard al ḥasan* sehingga nilai *return on equity* yang didapatkan menjadi bias dan tidak bisa mewakili keadaan yang seharusnya didapatkan yaitu ketika *return* tinggi seharusnya berdampak positif juga terhadap pembiayaan *qard al ḥasan* karena merupakan hasil pengelolaan modal, dimana *return* yang dihasilkan kemudian akan ditanam kembali untuk dijadikan modal kembali sebagai sumber pembiayaan *qard al ḥasan* di KJKS BMT MMU Sidogiri.

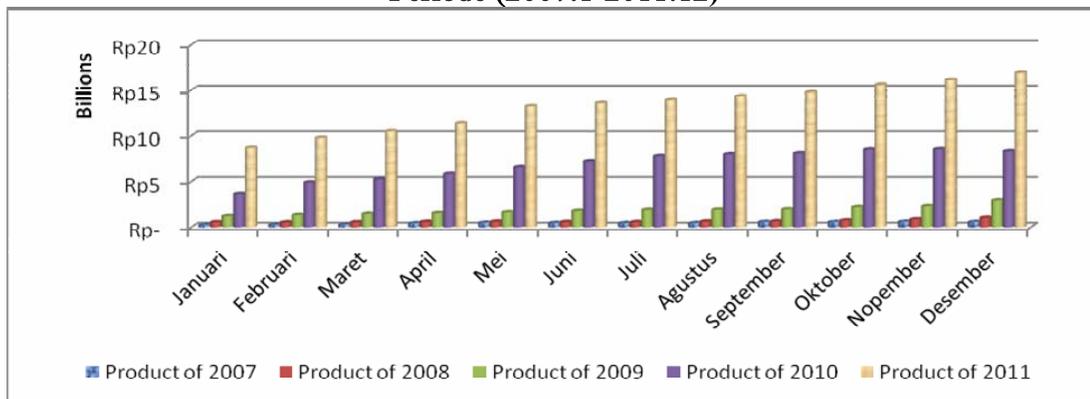
Pemberian pembiayaan oleh LKS termasuk pembiayaan *qard al ḥasan* akan dipengaruhi dan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, salah satu faktor yang diindikasikan mempengaruhi pembiayaan lembaga keuangan adalah inflasi. Pada penelitian kali ini inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan *qard al ḥasan* pada

KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan. Berdasarkan hasil regresi nilai signifikansi inflasi sebesar 0,589 (lebih besar dari $\alpha = 5\%$), apabila nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$ menandakan bahwa variabel tersebut (inflasi) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan *qard al hasan*

Koefisien regresi antara inflasi dengan pembiayaan *qard al hasan* sebesar adalah -7,326E9 apabila persentase inflasi naik 1% maka menyebabkan pemberian pembiayaan *qard al hasan* oleh KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan berkurang atau turun sebesar 7,326E9 namun, inflasi bukanlah variabel yang signifikan mempengaruhi pembiayaan *qard al hasan*, sehingga naik turunnya inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan *qard al hasan*.

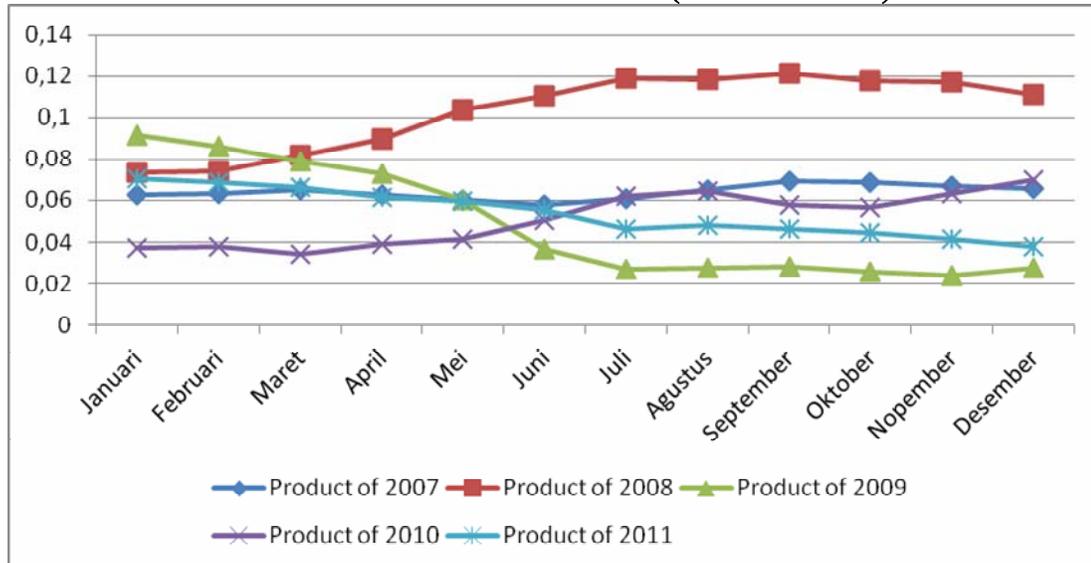
Berdasarkan laporan keuangan tahunan KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan yang menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *qard al hasan* dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan, walaupun pada Mei tahun 2008 hingga akhir tahun 2008 nilai inflasi berada di atas 10% yakni inflasi meningkat.

Gambar 5.1
Grafik Pertumbuhan Qard al Hasan pada KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan
Periode (2007:1-2011:12)



Sumber : Laporan Keuangan Bulanan KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan (dengan pengolahan)

Gambar 5.2
Grafik Inflasi di Indonesia Periode (2007:1-2011:12)



sumber : Bank Indonesia (www.ib.go.id)

Pada tahun 2007-2008 rata-rata nilai inflasi di Indonesia termasuk pada tingkat rendah sebab nilai persentasenya di bawah 20%. Pada tingkat nilai inflasi ini orang masih mempercayai nilai uang atau nilai uang tidak jauh berbeda dengan nilai *output* barang dan jasa. Pada saat inflasi dalam kondisi normal tidak akan mengganggu keseimbangan kondisi keuangan LKS sehingga tidak menghalangi pemberian pembiayaan *qard al hasan* kepada nasabah KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan.

Berdasarkan analisa pada paragraf sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa selama inflasi dalam kondisi normal dan keberadaan inflasi tidak terlalu mengganggu keseimbangan antara nilai uang dengan nilai *output*, maka KJKS BMT

MMU Sidogiri Pasuruan akan memberikan pembiayaan *qard al hasan* dan fungsi sosial *qard al hasan* dapat berjalan dengan baik.

Melihat kenyataan di atas mengenai pengaruh laba, *return on equity* (ROE) dan inflasi terhadap transaksi pembiayaan *qard al hasan* tentulah sulit dilakukan bagi Lembaga Keuangan konvensional, karena bagi Lembaga Keuangan konvensional yang menggunakan prinsip memperdagangkan uang, tentunya sangat rugi jika memberikan uang tanpa imbalan apapun. Penerapan prinsip saling menolong dengan memberikan dana talangan kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan bukti bahwa KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan sudah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermadiari dan sekaligus melaksanakan fungsi sosialnya. KJKS BMT MMU Sidogiri Pasuruan juga telah menjalankan prinsip kemitraan dengan memposisikan nasabah investor (penyimpan dana/penabung), pengguna dana, serta KJKS sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Semuanya memiliki hak, kewajiban, dan beban atas risiko dan keuntungan yang berimbang, saling menguntungkan dan tidak ada eksploitasi.